

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI *SMART CITY*

#### 2.1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Melalui UU No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah, berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Otonominya berada pada tingkat provinsi, bukan pada tingkat kota. Wilayah DKI Jakarta meliputi 6 antara lain 5 wilayah kotamadya dan 1 kabupaten administratif. Adapun visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilansir ke dalam *website* Jakarta.go.id, “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.

DKI Jakarta memiliki misi dan tujuan untuk menciptakan sikap kepemimpinan yang merangkul, melibatkan, memanusiakan dan memobilisasi pengikutnya untuk Jakarta menjadi kota yang aman, nyaman, cerdas, berbudaya dan sehat. Jakarta juga diperuntukan sebagai kota yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, menjaga stabilitas dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar proses investasi dan menjalankan usaha, serta meningkatkan tata ruang. Selain itu, Jakarta diasiasi sebagai kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Menjadikan Jakarta juga sebagai wadah aparatur negara untuk berfungsi, melayani dan menangani berbagai masalah yang dihadapi kota dan warganya secara efisien, meritokratis dan jujur

serta Jakarta sebagai ibu kota dinamis yang menjadikan simbol kemajuan Indonesia dengan bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

### 2.1.1. Kondisi Geografis

Dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, Jakarta merupakan dataran rendah.  $6^{\circ}12'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ}48'$  Bujur Timur adalah koordinat kota ini. Provinsi DKI Jakarta memiliki luas kurang lebih 7.659,02 km<sup>2</sup> yang meliputi 110 pulau di Kepulauan Seribu dan 6.997,50 km<sup>2</sup> lautan. Provinsi DKI Jakarta antara lain terdiri dari 5 wilayah kota dan 1 kabupaten administratif.

**Tabel 2.1. Luas Wilayah Masing-Masing Kotamadya Provinsi DKI Jakarta**

| No. | Kotamadya                                | Luas                   |
|-----|--|------------------------|
| 1.  | Jakarta Pusat                            | 47,90 km <sup>2</sup>  |
| 2.  | Jakarta Utara                            | 154,01 km <sup>2</sup> |
| 3.  | Jakarta Barat                            | 126,15 km <sup>2</sup> |
| 4.  | Jakarta Selatan                          | 145,73 km <sup>2</sup> |
| 5.  | Jakarta Timur                            | 187,73 km <sup>2</sup> |
| 6.  | Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu | 11,81 km <sup>2</sup>  |

Sumber: <https://jakarta.bpk.go.id/>



**Gambar 2.1. Provinsi DKI Jakarta**  
 Sumber: jakarta.bpk.go.id

Muara dari 13 sungai dan 2 kanal dapat ditemukan sepanjang 35 km dari pantai utara provinsi ini. Laut Jawa juga berbatasan dengan wilayah utara Jakarta. Provinsi ini berbatasan di selatan dan timur dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi juga dikelilingi oleh Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

### 2.1.2. Sekilas Demografi

Secara umum, penduduk, kepadatan penduduk, penduduk berdasarkan kepercayaan, umur, luas wilayah, pekerjaan dan faktor lainnya digunakan untuk menganalisis situasi demografis pada suatu wilayah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas mendata data-data kependudukan dan memberikan pelayanan dokumen kependudukan di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai kota metropolitan selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilansir Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 10,56 juta jiwa.

**Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Hasil Sensus Penduduk 2020 menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin**

| Kabupaten/Kota     | SP2020           |                  |                   |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                    | Laki-laki        | Perempuan        | Total             |
| (1)                | (2)              | (3)              | (4)               |
| Kepulauan Seribu   | 14.051           | 13.698           | 27.749            |
| Jakarta Selatan    | 1.122.094        | 1.104.718        | 2.226.812         |
| Jakarta Timur      | 1.529.659        | 1.507.480        | 3.037.139         |
| Jakarta Pusat      | 538.236          | 518.660          | 1.056.896         |
| Jakarta Barat      | 1.229.435        | 1.205.076        | 2.434.511         |
| Jakarta Utara      | 901.306          | 877.675          | 1.778.981         |
| <b>DKI Jakarta</b> | <b>5.334.781</b> | <b>5.227.307</b> | <b>10.562.088</b> |

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki komposisi penduduk tertinggi pada kelompok umur 0 sampai 14 tahun sebesar 26,57 persen dan Kota Jakarta

Selatan memiliki komposisi penduduk terendah sebesar 21,80 persen menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2020. Persentase penduduk berusia 65 tahun ke atas tertinggi di Kota Jakarta Pusat (6,08%) dan terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (3,42%). Kabupaten Kepulauan Seribu terlihat memiliki tingkat produktivitas terendah, yaitu sebesar 30,09 persen. Baik Kota Jakarta Pusat maupun Kota Jakarta Selatan memiliki 72,61 persen penduduk pada kelompok usia produktif (15-65 tahun). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kelompok usia produktif di tingkat DKI Jakarta yang hanya sebesar 71,98 persen.



**Gambar 2.2. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota Tahun 2020**

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Jumlah penduduk (termasuk penduduk setempat dan warga asing) dibagi dengan luas wilayah menghasilkan kepadatan penduduk di DKI Jakarta. Kepadatan penduduk DKI Jakarta meningkat menjadi 16.869 per km<sup>2</sup> pada tahun 2020. Dengan kepadatan penduduk rata-rata 22.034 per

km<sup>2</sup>, Jakarta Pusat menyandang predikat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi. Kepulauan Seribu, sebaliknya, memiliki kepadatan penduduk terendah dengan 2.871 orang per kilometer persegi. Hal ini juga dipengaruhi oleh luas wilayahnya yang paling sempit.

## **2.2. Jakarta Smart City**

Kota Jakarta merumuskan konsep *smart city* sejak bulan Desember tahun 2014 silam. Perumusan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta No. 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola *Jakarta Smart City* yang selanjutnya di perbaharui menjadi Pergub No. 306 Tahun 2016. Sejak adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2017, konsep *smart city* ini memang termasuk dalam misi pertama.

*Jakarta Smart City* (JSC) merupakan pengimplementasian konsep *smart city*. Pemrov DKI Jakarta mengukung JSC bukan tanpa alasan. Fakta bahwa Jakarta sebagai ibu kota memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi dan pendapatan per kapita terbesar di Indonesia menjadi salah satu penyebab utamanya. Akibatnya, Jakarta menghadapi sejumlah masalah pelik.

Penggunaan gagasan ini adalah untuk secara efektif dan efisien memahami dan mengelola berbagai sumberdaya. Tujuannya adalah memahami dan mengelola apa yang diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dengan meningkatkan penyediaan layanan publik dan menawarkan perbaikan untuk berbagai masalah. Kompleksitas masalah ini, dengan jawaban yang tepat, dapat diubah menjadi batu loncatan yang berguna dalam perjalanan Jakarta menjadi *smart*

*city*. Dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di seluruh sektor publik, tujuan tersebut dapat tercapai. Akibat pendekatan dalam pembangunan Jakarta, kesejahteraan dan taraf hidup penduduk meningkat. Kesimpulannya, inisiatif *Jakarta Smart City* adalah suatu keharusan.

JSC memiliki visi “Jakarta Baru yang efisien dan inovatif”. Tujuan dari visi ini adalah menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang berkelanjutan, aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global. Tujuannya adalah untuk membangun Jakarta baru yang transparan, mencerahkan dan mendorong kerja tim melalui teknologi untuk peningkatan pelayanan publik. Meningkatkan daya saing dan menciptakan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan lebih lanjut yang dikejar JSC.

### **2.2.1. Perjalanan Jakarta Menjadi *Smart City***

Jakarta terus menanamkan usaha dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan konsep *smart city* yang diusung. Menurut data dari *website* resmi JSC, ada empat poin yang melandasi perjalanan Jakarta menuju *smart city* dan melandasi bagaimana JSC dapat berdiri hingga saat ini. Keempat poin tersebut antara lain:

- a. Mendefinisikan *smart city* bagi Jakarta. Berbagai program “pintar” yang aktif telah membantu Jakarta menjadi *smart city*. Namun, agar konsep tersebut dapat diterapkan dengan baik, Jakarta perlu memiliki tujuan dan metrik yang tepat, realistis, terukur dan dapat dilakukan.
- b. Menentukan Kondisi Tertarget. Pendekatan yang digunakan untuk memungkinkan hal ini adalah Kerangka Roda Kota Cerdas. Agar

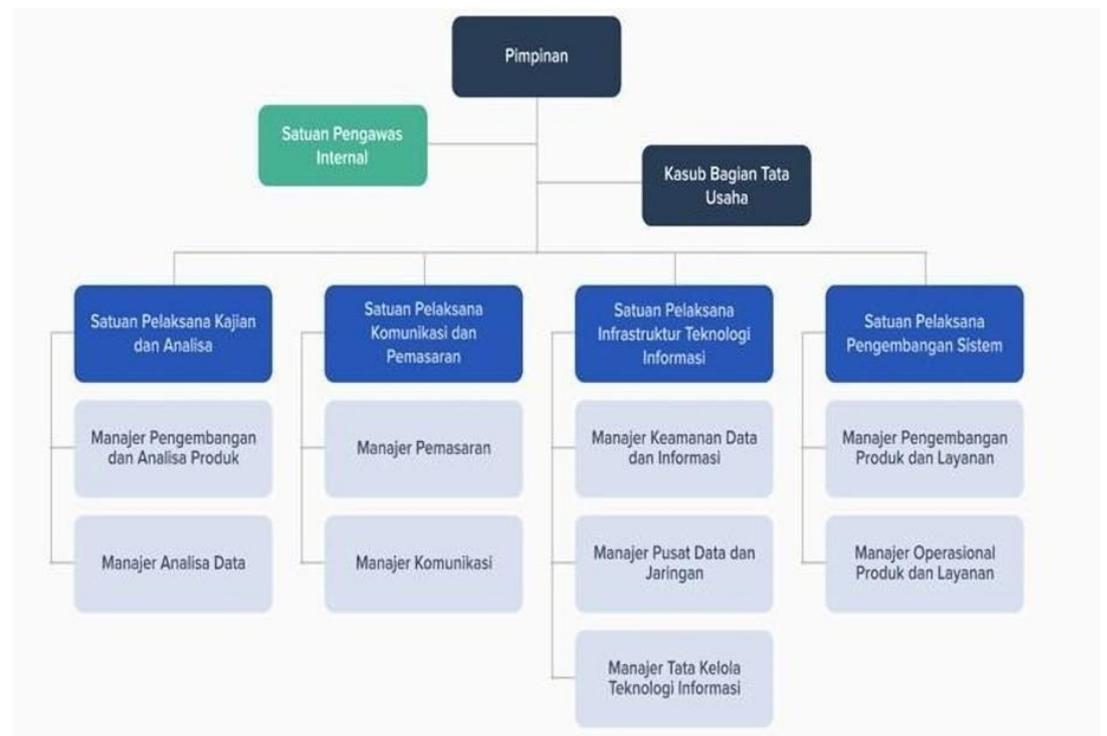
Jakarta menjadi kota pintar pada tahun 2025, Kerangka Roda Kota Cerdas sering digunakan untuk mengamankan kondisi yang diinginkan.

- c. Mengidentifikasi Kesenjangan. Memetakan kesenjangan yang ada di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu tujuan yaysan JSC ini. Ide ini juga bertujuan untuk menggunakan teknologi untuk mengatasi masalah ini. Pemetaan terutama digunakan untuk menentukan apa dan di mana sebagian besar masalah terjadi, setelah itu solusi masalah diperiksa.
- d. Mengusulkan Solusi. Tahap selanjutnya merupakan perumusan solusi untuk kesenjangan yang telah dianalisis. Untuk memastikannya, maka *blueprint* dan *roadmad* yang komprehensif dibuat sebagai panduan pelaksanaan dari solusi.

JSC memiliki 6 (enam) poin indikator. Keenam indikasi ini mengikuti pedoman yang diberikan oleh IBM, perusahaan komputer papan atas yang mempopulerkan gagasan “*smart city*” di Amerika. Metrik ini dimaksudkan untuk meningkatkan standar hidup penduduk perkotaan. Salah satu dari keenam indikator tersebut yang menjadi fokus penelitian ini adalah *Smart Governance*. *Smart governance* timbul untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang pintar, yang transparan, informatif, responsive terhadap kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, *smart governance* juga digunakan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelaporan dari saluran pengaduan masyarakat.

### 2.2.2. Unit Pelaksana *Jakarta Smart City*

Dinas Komunikasi, Informasi dan Humas Provinsi DKI Jakarta membawahi Unit Implementasi *Jakarta Smart City* (UP JSC). Dengan demikian, Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinkominfo DKI Jakarta sama-sama bertanggung jawab langsung bersama dengan UP JSC. UP JSC bekerjasama dengan dinas lain di Dinkominfo DKI Jakarta hingga instansi DKI Jakarta lainnya dalam rangka menjalankan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi berupa data-data yang berpengaruh bagi pengembangan *Smart city* sendiri. Saat ini, *Jakarta Smart City* dipimpin oleh Bapak Yudhistira Nugraha sebagai Kepala Unit Pengelola *Jakarta Smart City*.



**Gambar 2.3. Struktur Organisasi *Jakarta Smart City***

Sumber: *Jakarta Smart City*, 2023

Berikut ini adalah penjelasan dari setiap elemen yang tertera pada bagan struktur di atas :

1. Subbagian Tata Usaha.

Dikepalai oleh Bapak Billy Alkadia. Subbagian Tata Usaha Satuan Kerja Unit Pengelola *Jakarta Smart City* mengawasi kepegawaian, keuangan, barang, kerumahtanggaan, tata usaha, kearsipan, kehumasan, data dan sistem informasi selain pada mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian UP JSC.

2. Satuan Pelaksana Kajian dan Analisa.

Dikepalai oleh Bapak Einst Rengga Damahatko. Unit Pelaksana Kajian dan Analisis Unit Pengelola *Jakarta Smart City* menyelenggarakan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi, membuat standar tata kelola, integrasi data/sistem dan aspek digital *co-working space* dengan sistem JSC. Selain itu juga melakukan perencanaan studi, analisis, penelitian, serta penilaian dan pengembangan JSC.

3. Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran.

Dikepalai oleh Ibu Rika Zikriyyah. Unit Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Unit Pengelola *Jakarta Smart City* mengelola pengaduan masyarakat melalui jalur resmi Pemprov DKI Jakarta yang dikelola JSC, merencanakan strategi pemasaran, melaksanakan promosi dan

kampanye, serta memfasilitasi kemitraan untuk meningkatkan kapasitas JSC.

4. Satuan Pelaksana Infrastruktur Teknologi Informasi.

Dikepalai oleh Bapak Ardhika Iman Satria. Satuan Kerja Unit Pelaksana Infrastruktur Teknologi Informasi Unit Pengelola *Jakarta Smart City* melakukan penyediaan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur, mengembangkan tata kelola dan standar integrasi data/sistem dan aspek digital *co-working space* dengan sistem JSC, mengimplementasikan integrasi data/sistem dan aspek digital *co-working space* dengan sistem JSC, mengelola jaringan dan infrastruktur, serta melakukan monitoring dan evaluasi JSC.

5. Satuan Pelaksana Pengembangan Sistem.

Dikepalai oleh Bapak Rahan Yama Gusta, Unit Pelaksana Pengembangan Sistem Unit Pengelola *Jakarta Smart City* membangun dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi, mengelola pusat kendali operasi (*room monitoring*), portal resmi, serta membuat rencana pengembangan dan pengembangan sistem elektronik untuk penggunaan internal dan pengguna JSC.

### **2.3. Jakarta Lapor (JakLapor)**

Aplikasi Jakarta Kini yang selanjutnya disebut dengan JAKI, diperuntukan untuk masyarakat agar dapat melaporkan setiap apa yang terjadi di sekitar mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka tonton dan apa yang mereka rasakan. Wadah laporan yang dilakukan masyarakat ini diwujudkan dengan layanan

bernama JakLapor atau fitur JakLapor yang dibuat oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Harapannya, masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakannya untuk turut serta berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi, keluhan dan pengaduan kepada pemerintah.

JAKI dan Fitur JakLapor ini diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada 27 September 2019 di *Town Hall Meeting* Balaikota. JakLapor dan secara umum aplikasi JAKI diproyeksikan menjadi one stop services masyarakat DKI Jakarta maupun warga yang beraktivitas di Jakarta. Aplikasi JAKI secara umum diserahkan kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) *Jakarta Smart City* untuk dikelola di bawah pengawasan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Fitur JakLapor merupakan bagian dari pelayanan publik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 yang mengatur Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi *Citizen Relation Management*. Laporan yang diterima dalam penanganannya sendiri diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 22 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan kemudian diperbarahui ke dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 99 Tahun 2022.

Sebelum adanya JAKI, masyarakat DKI Jakarta mengenal adanya Qlue dan CROP. Namun, Qlue dan CROP bukanlah pendahulu JAKI secara konsep. Secara konsep, JAKI, CROP dan Qlue berbeda. JAKI adalah aplikasi yang memiliki salah satu bagian kanal pengaduan yaitu JakLapor, sedangkan Qlue dahulunya merupakan kanal pengaduan. Sebelum SK Sekda mengalami perubahan di SK

Sekda No 22 Tahun 2020, Qlue menjadi salah satu kanal pengaduan. Kalau CROP sendiri berganti *branding* menjadi CRM atau Cepat Respon Masyarakat.

Jakarta menghadapi sejumlah kesulitan karena kepadatan penduduknya yang tinggi dan pendapatan per kapita yang tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Demi kenyamanan seluruh penghuninya, Jakarta sebagai kota metropolitan besar membutuhkan solusi yang efektif dan efisien. Meski banyak kendala telah diatasi, Jakarta masih perlu diperbaiki karena selalu ada ruang untuk berkembang. Mengoptimalkan teknologi untuk menghasilkan pelayanan publik yang maksimal adalah cara yang dipilih untuk ditempuh pemerintah. Prosedur pelayanan yang diubah menjadi digital, teknologi yang dikembangkan, transformasi partisipasi masyarakat, akses yang dibuka lebar, adalah cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta agar bisa melebur dengan masyarakat. Semua hal tersebut dilakukan agar Jakarta bisa menjadi kota yang lebih baik dan lebih ramah kepada warganya. Oleh karena itu, JSC bisa dibilang sebagai perwujudan tujuan-tujuan di atas. Salah satu aplikasi dan layanan yang terintegrasi dengan JSC adalah Jakarta Kini atau JAKI.

Saat ini JAKI memiliki kanal unggulan yaitu JakLapor. Melalui kanal JakLapor, masyarakat dapat melaporkan masalah di sekitar Ibukota dengan 3 langkah sederhana; ambil gambar, deskripsikan dan kirimkan. Setiap laporan dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak terlihat oleh pengguna lain. Nantinya, laporan yang sudah dibuat oleh masyarakat diterima dan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lalu masuk ke sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM) untuk penanganan yang efektif serta cepat.